



TANTANGAN DAN KESEMPATAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DASAR DAN MENEGAH DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Endah Rantau Itasari

Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak

E-mail: itasari@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2021
Diterima: 12 Januari 2022
Terbit: 1 Februari 2022

Keywords:

Challenges and opportunities, Education, Border areas

Kata kunci:

Tantangan dan kesempatan, Pendidikan, Kawasan perbatasan negara

Abstract

Increasing access to education cannot be separated from the spatial use and utilization plan of the border area itself. Oftentimes, the Regional Spatial Planning (RTRW) which is intended for the opening and construction of schools at the village and sub-district levels becomes an obstacle to the program because it must be reviewed and changed, or simply violated. In fact, almost all of the licensing processes for the establishment of primary and secondary schools for private primary and secondary schools established by non-state entities are very difficult to obtain due to the unclear use and utilization of regional space. The number of permits issued has begun to be targeted by the DPRD for the fulfillment of PAD, so that issues that do not match the existing spatial plan are not taken seriously. In the end, sustainability as a principle and good governance as a practice which are two twin aspects of good spatial planning only exist in the concept because they only serve as tools to legitimize public sector malpractice in the use of space and exploitation of resources, especially in border areas. Permits to use space for the establishment of primary and secondary schools by the private sector should be adjusted to the state's alignment with increasing access to education.

Abstrak

Peningkatan akses pendidikan tidak dapat dilepaskan dari rencana penggunaan dan pemanfaatan tata ruang dari kawasan perbatasan itu sendiri. Bahkan seringkali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diperuntukan untuk pembukaan dan pembangunan sekolah di level desa dan kecamatan menjadi penghambat program karena harus ditinjau kembali dan

Corresponding Author:

Endah Rantau Itasari

diubah, atau cukup dilanggar begitu saja. Bahkan hampir semua proses perizinan pendirian sekolah dasar dan menengah bagi sekolah dasar dan menengah swasta yang didirikan oleh entitas non negara sangat sulit diperoleh karena ketidakjelasan penggunaan dan pemanfaatan ruang wilayah. Jumlah izin yang dikeluarkan mulai ditargetkan oleh DPRD untuk pemenuhan PAD, sehingga persoalan tidak cocok dengan rencana tata ruang yang ada tidak terlalu dihiraukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sebagai prinsip dan good governance sebagai praktik yang merupakan dua aspek kembar dari penataan ruang yang baik hanya ada dalam konsep karena hanya menjadi alat legitimasi malpraktik sektor publik dalam pemanfaatan ruang dan eksploitasi sumber daya khususnya di kawasan perbatasan. Ijin pemanfaatan ruang bagi pendirian sekolah dasar dan menengah oleh sektor swasta sebaiknya disesuaikan dengan keperpihakan negara pada peningkatan akses pendidikan.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Keterbukaan dalam era globalisasi juga mengakibatkan ketidakmungkinan bagi negara manapun untuk mengisolasi diri dari perkembangan dunia yang semakin cepat. Hal ini semakin dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi seperti satelit, internet, dan High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) yang mampu menembus batas-batas negara, sehingga dunia terasa semakin sempit dan jarak terasa semakin “dekat”, karena komunikasi di dunia maya berlangsung dalam “real time”. Kecanggihan teknologi tersebut membuat perubahan situasi dan kondisi sosial masyarakat dunia semakin cepat dan berlangsung secara terus-menerus sehingga perubahan menjadi keniscayaan di dunia. Keterbukaan ini juga harus difasilitasi oleh negara di kawasan perbatasan. Akses terhadap informasi dengan adanya teknologi informasi menjadi salah satu prioritas pendidikan di kawasan perbatasan supaya literasi teknologi dapat ditingkatkan dan dapat menjadi pentahapan pembangunan pendidikan dasar dengan wilayah-wilayah perkotaan yang telah maju.

Di era globalisasi, pendidikan bukan lagi merupakan ranah terpisah yang bisa dilaksanakan tanpa pertimbangan atas perkembangan yang terjadi di ranah lain karena wilayah perbatasan rentan terjadi gangguan keamanan dan rentan terhadap bio-security. Adanya kejadian pandemi SARS, flu burung, flu babi, terorisme, keselamatan penerbangan, terjadinya iklim ekstrim, dan krisis ekonomi global tak dapat dimungkiri telah ikut mereduksi kemampuan negara-negara di dunia. Hal ini menjadi bukti bahwa masalah yang terjadi di satu negara dapat menyebar dengan cepat dan menjadi tidak terpisahkan dari masalah di negara lain, sehingga mengharuskan semua negara bekerjasama untuk menanggulangnya.

Di level bawah, pendidikan adalah modal dasar untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan untuk deteksi dini terhadap segala kemungkinan

sehingga peningkatan akses pendidikan mutlak diperlukan. Oleh karena itu, pembangunan sistem pendidikan dasar dan menengah, mau tidak mau harus melebar dan “merangkul” sistem-sistem lain agar akses pendidikan dasar dan menengah itu sendiri bisa bertahan dan berkembang. Implikasi dari globalisasi bagi peningkatan akses pendidikan di Kabupaten Sambas, Kapuas Hulu, Bengkayang, Sanggau dan Sintang Provinsi Kalimantan Barat menghasilkan tiga buah kata kunci pembangunan daerah yang berkelanjutan yaitu: (1). Ketahanan pendidikan; (2). Peningkatan daya saing; dan (3). Perencanaan dan manajemen Pendidikan.

Di samping itu, terjadinya liberalisasi sektor ekonomi di berbagai negara merupakan tantangan besar bagi segenap negara di dunia pada abad ke-21 ini. Liberalisasi dan globalisasi tentu saja menempatkan negara-negara berkembang di dunia pada posisi yang harus menghadapi tantangan semakin kompleks untuk menuju pada langkah kompetitif dan tetap dapat berpartisipasi dalam persaingan global. Pendidikan seperti halnya sektor perekonomian lainnya, memiliki peluang semakin berkembang yang cukup besar, dengan adanya liberalisasi. Hal tersebut disebabkan oleh karena semakin terbukanya sektor perjalanan barang dan jasa luar negeri, perdagangan, dan investasi. Pembangunan pendidikan melalui peningkatan akses sebagai bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan antara lain memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja di wilayah-wilayah yang selama ini termarjinalkan.

Sejalan dengan tahap-tahap pembangunan nasional, pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional dilaksanakan secara menyeluruh, berimbang, bertahap, dan berkesinambungan. Nampak jelas bahwa pembangunan di bidang pendidikan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan daya saing SDM masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pentingnya pembangunan tersebut, maka dalam penyelenggaraannya harus berdasarkan asas-asas manfaat, usaha bersama, kekeluargaan, adil, merata, peri kehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri. Pendidikan dasar dan menengah termasuk dalam program pembangunan nasional di Indonesia sebagai salah satu sektor pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan dalam akses di kawasan perbatasan negara.

Pendidikan dasar merupakan kegiatan berbasis masyarakat yang dibangun di atas interaksi sosial, dan dengan demikian pendidikan dasar hanya dapat berjalan jika melibatkan penduduk lokal dengan berkontribusi terhadap nilai-nilai sosial seperti partisipasi, akuntabilitas dan peran pemerintahan lokal ditingkatkan. Pada saat yang sama, tidak akan ada pengembangan akses pendidikan dasar dan menengah yang nyata jika pembangunan tersebut tidak dilaksanakan berbasis pada nilai-nilai dan budaya masyarakat setempat atau jika manfaat sosial-ekonomi yang dihasilkan oleh sektor pendidikan tidak menetes ke bawah kepada tingkat masyarakat.

Seperti yang tercantum dalam United Nations World Tourism Organization (UNWTO), "penduduk lokal harus dikaitkan dengan kegiatan pendidikan dan kepariwisataan dan secara adil dalam manfaat ekonomi, sosial dan meningkatkan budaya setempat". Sesuai dengan falsafah ideologi bangsa, pembangunan peningkatan akses pendidikan Indonesia harus diarahkan pada pemanfaatan dan penghargaan budaya nasional sebagai upaya menuju kesejahteraan rakyat. Arti

yang lebih luas adalah bahwa pembangunan peningkatan akses pendidikan diarahkan untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya dengan memanfaatkan dan menjaga beragam potensi masyarakat yang bersumber dari kebudayaan dan alam Indonesia. Sampai sejauh ini berbagai upaya untuk menuju ke arah itu telah dilakukan oleh pemerintah dan segenap stake-holder pendidikan, yaitu pemerintah pusat, pememrintah daerah dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris untuk memperoleh keunggulan dan kebenaran akademik terhadap pemenuhan kewajiban internasional HAM yang diterima Indonesia, khususnya di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan ICESCR. Penelitian ini bertujuan n mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten terhadap pemenuhan hak pendidikan oleh negara Indonesia pasca meratifikasi ketentuan internasional sejak tahun 2005 sampai dengan 2018. Analisis dan konstruksi terhadap data primer dan bahan hukum sekunder menentukan jenis normatif empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk memperoleh data primer serta studi dokumen untuk memperoleh data sekunder.²⁸ Sebagai penelitian hukum normatif empiris, maka pengumpulan data dalam penelitian ini telah dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi dokumen. Penelitian lapangan dilakukan terhadap responden pemangku kepentingan di kelima kabupaten di kawasan perbatasan yaitu: (1). guru dan kepala sekolah di Kecamatan Entikong dan Aruk; dan (2). LSM pendidikan di Kecamatan Entikong dan Aruk yaitu Dompot Dhuafa dan Wahana Visi Indonesia (WVI) di Sambas. Wawancara terstruktur juga telah dilakukan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Deputi 5 Kantor Staf Presiden bidang Perbatasan dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemdiknas dalam kurun waktu Desember 2017 sampai dengan Februari 2018.

Analisis data adalah uraian mengenai cara-cara analisis yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis dan dikaji relevansi hukumnya dan digunakan untuk menguraikan konsepsi-konsepsi maupun teori yang digunakan dalam Disertasi ini. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang artinya analisis ini hendak mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh yaitu kesesuaian indikator pemenuhan hak atas pendidikan di kawasan perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk melakukan analisis secara kualitatif ini, peneliti melakukan analisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu: (1). Mengumpulkan data dengan dikelompokkan sesuai dengan obyek atau variabel dalam penelitian; (2). Memilah dan mengolah data mengenai hukum, kebijakan, program, kegiatan serta pendanaan pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan; (3). Mengevaluasi data dengan kuantifikasi dan preskripsi

sesuai dengan relevansinya, (4). Menetapkan kesimpulan dan rekomendasi jika diperlukan dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu persoalan terpenting dalam pengelolaan wilayah perbatasan negara adalah administrasi dan manajemen. Dalam ruang lingkup pengelolaan inilah sebuah negara dituntut untuk mengurus wilayah perbatasannya secara optimal, termasuk untuk menghadirkan kesejahteraan kepada warganya yang tinggal di wilayah perbatasan. Dalam konteks pengelolaan wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, persoalan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perbatasan adalah minimnya pembangunan sosio-ekonomi di kawasan perbatasan. Kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, minimnya infrastruktur dan kurangnya pelayanan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar merupakan fenomena yang secara umum ditemui di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia.

Akibatnya timbul kesenjangan taraf kehidupan penduduk yang tinggal di sisi wilayah Indonesia dengan yang tinggal di sisi wilayah negara tetangga, khususnya dengan Malaysia, kesenjangan itu dapat begitu tingginya sehingga dapat menimbulkan persoalan-persoalan keamanan dan ketergantungan penduduk di wilayah Indonesia terhadap layanan dan fasilitas yang disediakan oleh Malaysia. Persoalan-persoalan dalam isu utama pengelolaan wilayah perbatasan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mengancam eksistensi kedaulatan negara Indonesia atas wilayahnya. Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan negara kegagalan negara untuk menghadirkan dirinya ke hadapan masyarakat perbatasan selama ini telah menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak usia sekolah di wilayah perbatasan. Hal ini juga sedikit banyak telah menyebabkan terkikisnya rasa nasionalisme mereka karena pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang negaranya sendiri, sementara setiap harinya mereka berinteraksi secara intensif dengan negara tetangga.

Rendahnya kualitas pendidikan di wilayah perbatasan secara filosofis bertentangan dengan tujuan negara Republik Indonesia, terutama: “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah merupakan salah satu tugas utama yang harus dilaksanakan. Selain itu, kewajiban internasional yang bersumber dari instrumen-instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia juga mendorong negara harus seoptimal mungkin melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan negara.

Perubahan paradigma pengelolaan perbatasan negara dari *inward looking* yang menekankan pada pendekatan keamanan menjadi *outward looking* yang menekankan pada pendekatan kesejahteraan menyebabkan prospek dan peluang bagi pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan menjadi terbuka. Wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan wilayah lainnya dalam hal ini tentu saja memerlukan regulasi, kebijakan dan program yang lebih spesifik. Mengikuti pendapat John Rawls, regulasi, kebijakan dan program yang spesifik untuk wilayah perbatasan

merupakan cerminan dari keadilan distributif atau sebagai insentif untuk merubah kondisi ketertinggalan menjadi daerah yang setara dengan daerah lainnya. Bahkan dalam kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi, wilayah perbatasan ingin benar-benar dijadikan sebagai beranda depan atau sebagai etalase dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan pendidikan mengikuti perubahan pelaksanaan pembangunan yang dahulu difokuskan dan dilaksanakan di daerah perkotaan (urban) ke daerah pedalaman (rural). Daerah-daerah di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal dirubah sebagai cikal bakal kota. Pembangunan yang cukup mulai terlihat di wilayah-wilayah perbatasan negara. Pembangunan dan renovasi berbagai Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang bukan saja memenuhi aspek estetika dan artistik, namun juga dilengkapi dengan fungsi-fungsi yang modern dari CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security). Berbagai fasilitas, sarana dan prasarana pendukung juga mulai dan sudah dibangun, seperti fasilitas penunjang perekonomian, kantor-kantor yang melaksanakan fungsi layanan jasa dan pemerintahan dan termasuk sarana transportasi seperti jalan raya.

Dari segi regulasi, berbagai peraturan di tingkat pusat dan daerah telah dibuat dan disempurnakan untuk menyesuaikan kondisi terbaru dari pengelolaan wilayah perbatasan. Regulasi-regulasi tersebut dibuat untuk memastikan terjadinya peningkatan akses terhadap pendidikan, khususnya dasar dan menengah serta untuk meningkatkan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana. Regulasi tersebut juga kemudian diikuti oleh serangkaian kebijakan dan program yang merupakan bagian dari strategi pencapaian tujuan pembangunan pendidikan, khususnya di wilayah perbatasan. Pemerataan jumlah dan kualitas guru melalui program SM3T dan GGD, penambahan unit sekolah dan ruang sekolah melalui model SGD serta berbagai insentif serta tunjangan yang diberikan kepada guru maupun sekolah dan juga para siswa seperti Tunjangan Perbatasan, BOS dan KIP. Dengan berbagai persoalan dan keterbatasan, program dan kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan tersebut merupakan upaya untuk memastikan pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan negara, sekaligus upaya untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan kualitas SDM.

Sistem perencanaan terbaru yang menggunakan model money follow programi seharusnya memberikan keleluasaan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk mengusulkan daftar program prioritas dalam pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan di wilayah perbatasan. Kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana yang selama ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dapat diatasi melalui penyusunan Program Prioritas Pembangunan baik oleh Kementerian, Lembaga dan juga Pemerintah Daerah disertai dengan kajian-kajian yang komprehensif dan rekomendasi serta kejelasan mengenai target dan pelaksana program prioritas bidang pendidikan di wilayah perbatasan tersebut.

Tingginya minat dan kepedulian dari non-state actors dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan merupakan modalitas yang harusnya dapat dikelola oleh pemerintah untuk memelihara prospek dan peluang dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan. Korporasi yang beroperasi di wilayah perbatasan pada umumnya merupakan perusahaan-perusahaan besar dengan bidang usaha yang menghasilkan

keuntungan dalam jumlah yang juga besar. Melalui mereka, pemerintah harusnya mengarahkan Corporate Social Responsibility (CSR) yang lebih besar pada sektor pendidikan.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti yayasan, LSM, lembaga keagamaan juga terbukti telah memainkan peran penting dalam pendidikan di wilayah perbatasan. Pada sisi ini, pemerintah dapat mempermudah proses perizinan pendirian sekolah dasar dan menengah antara lain dengan memperjelas penggunaan dan pemanfaatan ruang wilayah. Kedekatan masyarakat perbatasan dengan wilayah negara tetangga juga dapat dilihat sebagai prospek dan peluang yang dapat dikelola. Kondisi pendidikan yang lebih maju di wilayah negara tetangga sesungguhnya dapat dimanfaatkan tanpa merugikan aspek kedaulatan dan nasionalisme masyarakat perbatasan. Jika jiwa kebangsaan dan nasionalisme para siswa sudah dapat ditanamkan dengan baik melalui kurikulum dan proses pembelajaran di tingkat pendidikan dasar, maka di tingkat pendidikan menengah, yaitu SMA dan terlebih lagi SMK yang terdapat di wilayah perbatasan dapat dilakukan proses pembelajaran atau pendidikan yang intinya adalah transfer of skills dan transfer of knowledge dari rekan-rekannya yang ada di wilayah negara tetangga. Program-program pemagangan ataupun pelatihan-pelatihan lainnya dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang lebih maju dari negara tetangga.

PENUTUP

Simpulan

Berbagai hal tersebut merupakan prospek dan peluang yang dapat ditangkap untuk memastikan pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan. Namun demikian, ada tantangan yang juga harus dihadapi. Tantangan utama dalam hal ini adalah bagaimana setiap level pemerintahan mulai pusat hingga kabupaten dapat berkoordinasi dan berintegrasi untuk mewujudkan perbatasan sebagai beranda depan NKRI.

Saran

Dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam paradigma pengelolaan perbatasan, maupun sistem perencanaan model money follow program, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tidak boleh lagi menjalankan birokrasi pembangunan “business as usual” seperti yang dilakukan selama ini. Sebagai bagian dari “Revolusi Mental”, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, dan dalam hal ini akselerasi mutlak diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad H Azhari, Peranan DPRD dalam Mewujudkan Pendidikan yang Berkeadilan, Makalah disampaikan dalam Temu Konsultasi Diseminasi RAN HAM Bidang Pendidikan, Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas, di Medan tanggal 22-25 Oktober 2002
- Amnesty International, 2014, Human Rights for Human Dignity, AI Publications, Second Edition

- Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.
- Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam

- Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283-294.
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283-294.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Fuad Al-Darawesh and Dale T Sinuwert, 2015, Human Rights Education Beyond Universalism and Relativism, A Relational Hermeneutics for Global Justice, Palgrave McMillan

- GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 96-106.
- GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 96-106.
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Hillary Rodham, 1973, "Children Under the Law", 43 Harvard Educational Review
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif. *Harmony*, 5(2), 143-154.
- Kathleen Funder, 1996, "Children's Rights: Setting the Scene", dalam Kathleen Funder (ed), *Citizen Child: Australian Law and Children's Rights*,
- Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 29-41.
- Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 538-547.
- Manfred Nowak, 1995, "The Right to Education" dalam Asbjorn Eide
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).

- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2)
- Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, 7(2), 135-148.
- Mangku, D. G. S. (2017). Peran Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste. *Perspektif*, 22(2), 99-114.
- Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia. *Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(4), 18-24.
- Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis Juris. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. *Veteran Law Review*, 1(1), 72-86.
- Mangku, D. G. S. (2020). Implementation Of Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia-Timor Leste In The Resolution Of The Land Border Dispute. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 405-419.
- Mangku, D. G. S. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat di Segmen Bidjael Sunan–Oben antara Indonesia dan Timor Leste. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 252-260.
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 21(1), 1-15.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).
- Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.

- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 57-62.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Fulfillment of Labor Rights for Persons with Disabilities in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 272-280.
- Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). *Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Suastika, I. N., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2021). The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(1).
- Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.
- Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.

- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).
- Purwanto, K. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113-123.
- Purwanto, K. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113-123.
- Purwendah, E. K., & Mangku, D. G. S. (2018). The Implementation Of Agreement On Transboundary Haze Pollution In The Southeast Asia Region For Asean Member Countries. *International Journal of Business, Economics and Law*, 17(4).
- Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Atlantis Press.
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69-78.
- Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69-78.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia

- (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 22-33.
- Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 22-33.
- Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Santosa, I. K. D., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 70-80.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Susan Roberta Katz and Andra Mceaov Spero, 2015, *Bringing Education to Classroom*, Palgrave McMillan
- The Vienna Declaration and Programme of Action, UN Doc. A/CONF.157/23, part II, para 79
- UNESCO & The World Bank, 2004, "Education in Indonesia: Managing the Transition to Decentralization, Indonesia Education Sector Review", Volume 2,
- UNICEF, 1998, *A Human Rights Approach to UNICEF Programming for Children and Women: What It is, And Some Changes It Will Bring*, 17 April 1998 dan bandingkan dengan The World Conference on Human

- Rights: Vienna Declaration and Programme of Action, UN Doc. A/CONF.157/23, Part I, para 5
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.
- Wahyudi, G. D. T., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT Di Malaysia). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 55-65.
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 124-133.
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 124-133.
- Wijayanthi, I. G. A. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Organisasi Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 155-163.
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 60-69.
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 60-69.
- Yulia, N. P. R. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3).
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).

- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(1), 41-49.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40.